

Strategi Partai Solidaritas Indonesia Sumut Untuk Dapat Menjadi Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019

Mela Sari Pili

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail : mellasaripili1591@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini dilatar belakangi oleh sebuah partai baru yang lolos verifikasi dalam pemilu 2019. Partai yang mengutamakan kalangan anak muda. Skripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia dalam menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta maupun peristiwa secara sistematis dan akurat serta menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka strategi Partai Solidaritas Indonesia ikut serta dalam menjadi peserta pemilu pada pemilu tahun 2019 dengan melakukan interaksi lebih dengan memperkenalkan partai politik kepada masyarakat agar bisa menjadi anggota partai politik melalui kaderisasi. Kemudian, melalui kartu sakti yang menjadikan modal untuk langkah kedepan menjadi peserta pemilu tahun 2019. Terakhir dengan mendekatkan diri melalui rezim pemerintahan melihat secara politik nasional sebagai partai politik baru, akan selalu berusaha agar tidak menjadi musuh oleh partai politik manapun.

Kata kunci: *PSI, Pemilihan Umum, Strategi Politik*

Abstract

This journal is motivated by a new party that passed verification in the 2019 election. A party that prioritizes young people. This thesis aims to explain the strategy carried out by the Indonesian Solidarity Party in dealing with the registration and verification of political parties in the 2019 General Election. This research uses a qualitative descriptive method, namely research that aims to present facts and events systematically and accurately and analyze their truth based on data obtained. obtained in the field. The data collection technique in this research is the interview technique. Based on the results of the research and discussion, the Indonesian Solidarity Party's strategy is to participate in becoming election participants in the 2019 elections by having more interaction by introducing political parties to the public so that they can become members of political parties through cadre formation. Then, through a magic card which provides capital for future steps to become a participant in the 2019 election. Finally, by getting closer through the government regime, seeing national politics as a new political party, we will always try not to become enemies with any political party.

Keywords: *PSI, General Election, Political Strategy*

PENDAHULUAN

Sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi, akan berjalan jika ada sistem kepartaian, tetapi tidak cukup buat menghasilkan demokrasi jika hanya sistem kepartaian saja yang bekerja. Maka untuk itu sistem politik demokrasi juga memerlukan partai politik yang fungsional, demokratis dan berlembaga dengan baik serta mampu bersifat

kompetitif karena partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi . Pengertian partai politik tidak hanya menjadi aspirasi saluran partisipasi politik warga negara karena mereka bisa berperan untuk mengintegrasikan sarana dalam wujud demokrasi yang sudah dijamin dalam negara hukum berbentuk sistem politik.

Menurut Budiardjo partai politik adalah kelompok politik dalam proses Pemilu yang selalu terlibat dan mampu menempatkan calon-calon yang terpilih untuk menduduki jabatan publik yang selalu ikut serta merta dalam pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana bagi partai politik untuk bertarung dalam dunia politik, tetapi tidak semua partai politik berhasil/lolos menjadi peserta Pemilu meskipun sudah memenuhi syarat berbadan hukum. Kelanjutan dalam partai politik harus melewati tahapan Pemilu untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi yang harus dipenuhi sebelum menjadi peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik, hal ini disebutkan bersifat eksplisit dalam konstitusi Pemilu.

Pendaftaran dan verifikasi partai politik harus mengikuti regulasi yang tersedia dengan memenuhi syarat yang ditentukan, persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu sudah diatur dalam pasal 173 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan partai politik harus berbadan hukum sesuai dengan UU partai politik. Pelaksanaan Pemilu menjadi sangat penting khususnya dari pelaksanaan pendaftaran hingga verifikasi terhadap partai politik agar bisa terwujudnya hasil Pemilu yang berkualitas melalui pendaftaran partai politik yang berlangsung mampu mengikuti prosedur dari peraturan yang berlaku. Partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu harus melewati tahapan-tahapan pendaftaran dan verifikasi Pemilu tahun 2019 yang diantaranya ;

Pertama, Partai Politik melakukan pendaftaran ke Komisi pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu merupakan langkah awal dalam praktik Pemilu di Indonesia. Prinsipnya pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019 menjadi kewenangan pengurus partai politik di tingkat provinsi, sedangkan tingkat kabupaten/kota mempunyai kewajiban dalam menyerahkan daftar nama anggota partai politik termasuk salinan berkas yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota partai politik yang disampaikan dari tingkat pusat ke KPU.

Kedua, setelah melewati tahapan tersebut, memasuki tahapan verifikasi administrasi, sederhananya verifikasi merupakan tahapan yang berlangsung ketika berkas sudah selesai dan dinyatakan lengkap pada masa pendaftaran. Kegiatan ini menjadi proses pemeriksaan yang berkaitan dengan memenuhi syarat sebuah partai politik untuk mengikuti proses Pemilu. Verifikasi juga menjadi upaya dalam pembuktian kebenaran yang mampu melihat keterpenuhan dari syarat untuk menjadi peserta Pemilu. Verifikasi administrasi adalah berkaitan dengan proses meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari pendaftaran partai politik. Kegiatan inilah yang mampu menganalisis dari Check kebenaran dan keabsahan partai politik sebagai calon peserta Pemilu.

Ketiga, masa perbaikan verifikasi administrasi ini berdasarkan dokumen persyaratan partai politik yang dalam pernyataannya belum lengkap atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Maka itu partai politik dapat memperbaiki kelengkapan persyaratan administrasi. Apabila persyaratan sudah di perbaiki dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

Keempat, setelah masa perbaikan dilakukan tahapan selanjutnya memasuki verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah proses untuk menentukan kebenaran dari persyaratan yang sudah tersedia dalam data laporan yang ada saat pendaftaran dengan kondisi yang ada di lapangan. Proses verifikasi faktual yang harus dilewati setiap partai politik yang sudah mendaftarkan diri. Verifikasi faktual seperti kantor tetap, pengurus maupun anggota yang sudah dihimpun melalui masa pendaftaran.

Kelima, verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh tingkat provinsi, petugas menerima berkas perbaikan dan meneliti hasil perbaikan serta memberi tanda terima berkas perbaikan yang dilakukan untuk mencocokkan data dari pendaftaran yang sudah berlangsung. Keenam, Rekapitulasi atau hasil verifikasi faktual kepada calon peserta Pemilu menggunakan berita acara yang disampaikan oleh KPU agar dilanjutkan penetapan partai politik peserta Pemilu. Diketahui Sistem Informasi Partai Politik bukan sesuatu yang baru

pada Pemilu tahun 2019 karena sempat diperkenalkan ketika registrasi partai politik Pemilu tahun 2014 tetapi SIPOL tidak bisa dipergunakan dengan baik dengan alasan beberapa faktor yaitu adanya resistensi (penolakan) yang berasal dari penggunanya yaitu partai politik. Cara kerja SIPOL juga berpengaruh dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu, diantaranya ; partai politik meng- Input data yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku ke dalam SIPOL; kemudian KPU Provinsi atau Kab/kota meng-input dari hasil verifikasi administrasi dan faktual; kemudian di Upload untuk di proses dan yang terakhir; penyelesaian dengan men-Submit data yang sudah ada di SIPOL..

Strategi dalam pengertian sempit terdapat tiga unsur menyatakan makna sebagai tujuan (ends), sarana, (means) dan cara (ways). Pengertian luas makna strategi adalah cara yang digunakan untuk sarana yang tersedia agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Marthin-Anderson (1968) mengemukakan strategi adalah sebuah kemampuan atau inteligensi sebuah pemikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan agar bisa lebih efisiensi dan maksimal. Strategi juga hakikatnya bisa memberikan perencanaan dan manajemen dalam pencapaian tujuan dalam praktik operasional Partai politik adalah bagian untuk memenuhi pengelompokan untuk membentuk satu visi dan misi yang idealnya tidak mungkin dalam satu negara memiliki satu partai, partai politik sendiri juga karena adanya pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi yang secara umum itu tidak terbatas pada organisasi politik.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie kata partai itu merupakan golongan yang di mana adanya sekelompok masyarakat yang berdasarkan kesamaan memiliki tujuan, ideologi, agama bahkan adanya kepentingan di dalam partai tersebut. Pengelompokan itu adalah organisasi yang dibedakan berdasarkan wilayah aktivitasnya dalam perkembangannya organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Menurut Ibnu Tricahyono yang mendeskripsikan Pemilu itu sebagai sudut pandang yang abstrak dan filosofis dan menjadikan instrumen untuk membentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk bentuk pemerintahan yang absah dan bisa di artikulasi aspirasi dari kepentingan rakyat itu sendiri². Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi penulis merasa tertarik dan mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui bagaimana Strategi Partai Politik Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru dalam menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik di wilayah Sumatera Utara.

METODE

Metode yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan data yang bersifat logika dan ilmiah. Metode Kualitatif adalah Penelitian yang bisa mencurahkan kemampuan sebagai orang yang di wawancara atau menjadikan peneliti yang empatik guna untuk membuat sekumpulan masalah yang akan di teliti dalam penelitiannya. Metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang rinci atau mendalam yang mengandung makna yang sebenarnya adalah data yang pasti dan bisa terlihat.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif yang artinya adalah jenis penelitian yang memahami dari beberapa fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya adanya perilaku, persepsi, motivasi ataupun tindakan yang lainnya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Maka itu metode kualitatif secara signifikan dapat dipengaruhi substansi penelitian. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dan skunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tahapan yang akan dilalui oleh partai politik sebagai peserta pemilu dimulai dengan masa pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta pemilu. Pada proses yang di dihadapi untuk dapat menjadi peserta pemilu harus sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal 173 ayat 2 tentang pemilu yang menjelaskan partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus

sudah berbadan hukum di KemenkumHam yang sesuai dengan undang-undang partai politik, kemudian memiliki kepengurusan minimal 100% di tingkat provinsi, memiliki kepengurusan minimal 75% di tingkat Kab/kota, memiliki kepengurusan minimal 50% di tingkat kecamatan, kemudian memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000 dimasing-masing kab/kota, memiliki keterwakilan perempuan 30% dalam tingkat pusat, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat maupun provinsi sampai tingkat kab/kota, dan memiliki lambang sebagai tanda partai politik serta memiliki nomor rekening.

Membahas Strategi yang hakikatnya menjadi bagian perencanaan dan bisa mengatur untuk bisa mencapai tujuan tersebut yang kemudian tujuan yang akan dicapai harus bisa menunjukkan arah dan usaha dan kemudian bisa menjelaskan bahwa strategi itu adalah taktik sehingga mampu dikembangkan. Pemimpin-pemimpin partai politik mengidentifikasi dari tujuan yang akan dicapai bisa terstruktur dan mampu mencapai hal tersebut.

1. Rekrutmen Politik

Partai Solidaritas tidak mengharapkan orang-orang yang masuk dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti partai politik karena kaderisasi yang baik dan mantap dengan sendirinya jika sudah diakui dengan kepribadian masing-masing. Menurut Peter Schorder menjelaskan dalam strategi yang dilakukan dengan menjadikan teknik untuk membentuk cita-cita politik dengan melakukan upaya-upaya agar memenangkan pertarungan politik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Peter Schorder untuk menjadi peserta pemilu pastinya memiliki teknik yang jelas agar lolos menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Maka itu cara PSI untuk mencapai strategi dalam rekrutmen dilakukan melalui dengan merekrut kader selain lewat web PSI yang sudah tertera. Setelah melewati tahapan itu maka akan memasuki data Base kedalam aplikasi PSI yaitu SIAP dan mendapati kartu tanda anggota (KTA).

2. Mendeklarasikan Kartu Sakti

Selain mererutan melalui web PSI dan PSI Sumut melainkan memiliki strategi khusus yang merekrut kader PSI dengan mendeklarasikan kartu sakti (Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Intoleransi) menjadikan sebagai daya tarik PSI untuk menarik masyarakat agar menjadi kader PSI dengan seharga dua puluh lima ribu dari pemilik kartu Sakti tersebut yang dipastikan mempunyai hak suara dalam kebijakan partai politik. Strategi partai politik menjadi bagian rencana sistematis yang dimiliki partai politik agar tujuannya bisa tercapai dan menjadi bagian kenangan penyusunan partai politik yang hendaknya dari tatanan kehidupan bermasyarakat agar bisa mencapai tujuan.

Sebagaimana dalam penjelasan makna strategi partai politik yaitu partai solidaritas Indonesia dengan menghadirkan ide kartu sakti itu cukup berhasil. Deklasrasi kartu sakti yang pada tahun 2018 menjadi bagian PSI yang berguna sebagai kontibutor dengan penjualan kartu tersebut berguna untuk operasional partai untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019. Untuk hal tersebutlah yang meramaikan pendatang baru turut meramaikan khazana politik indonesia dan menjadikan salah satu terobosan dibuat sebagai penggalang dana partai politik yang secara transparan yang dimana dana tersebut tidak jauh dari masyarakat sehingga bisa mencerminkan PSI milik publik bukan perorangan atau korporasi yang ditakutkan adanya sekat antara dunia politik.

Hal tersebut menyesuaikan dengan fungsi partai politik yang menjadikan bagian partisipasi politik. Menurut budiardjo partisipasi politik adalah bagian dari kegiatan warga negaranya yang mempengaruhi proses pembuatan dalam kebijakan umum yang bisa menentukan atau mengharapkan ketaatan dari warga dan aktivitas kegiatan warga sekitarnya. Cara lain yang ditempuh untuk mendapatkan dana, PSI sering mengadakan seminar dengan menghadirkan tokoh nasional, dalam perencanaannya peserta umum dikenakan biaya dan pemilik kartu sakti bisa mendapat potongan harga secara cuma-cuma.

3. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Universitas

Partai solidaritas Indonesiaa yang dikenal dengan kedudukan anak muda dan sellau mempunyai dorongan untuk kalangan milenial untuk bergabung di partai politik.

Memberikan penawaran perubahan dan kebahagiaan serta gagasan tentang masa depan yang lebih baik. Sebagai partai baru PSI juga membawa gagasan unik mulai dari cara perpolitikan yang baru dan sangat ketat dengan melibatkan pengurus harus dibawah 45 tahun dan belum pernah menjadi pengurus harian partai politik manapun.

Partai solidaritas indonesia yang diketuai oleh Fuad Ginting yang menjadikan sumber daya kepengurusan serta keanggotaan yang terlibat di FISIP USU, banyak sekali yang diusung untuk menjadi bagian kaderisasi dan masuk kedalam bagian pengurus serta keanggotaan partai politik. Cara PSI Sumut dengan memanfaatkan mahasiswa atau alumni yang ada di FISIP USU yang kemudian diminta data untuk kelengkapan data saja, data tersebut adalah KTP lalu di fotokopikan dan akan mendapatkan BUKU khusus membahas PSI dan setelahnya akan disosialisasikan kepada anggota akan ada cek kebenaran yang dilakukan oleh KPU tanpa mengikuti kegiatan politik dan sudah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) PSI.

Sehingga dalam praktiknya PSI sudah bergabung dengan rata-rata usia 30 tahunan dan cara inilah PSI memberikan kesempatan kepada generasi muda khususnya kalangan FISIP USU agar bisa selalu terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa agar selalu di dominasi oleh anak muda. PSI sangat menolak politik yang di dominasi orang-orang tua secara usia yang bisa mengelola politik secara usang dan tua. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua PSI Sumut Tahun 2019 dan selaku alumni Fisip USU tahun 2023 yang mengatakan bahwasanya: "seluruh keanggotaan dan kepengurusan PSI tidak jauh dari orang-orang atau kalangan FISIP USU". (Fuad Ginting, Akhirnya Coffe, 31/01/2023)

4. Membangun Reputasi Politik dengan Bentuk Edukasi Politik

PSI yang dikenal dengan partai anak muda, sehingga harus banyak edukasi yang akan menjadi penggerak dan membangun kekuatan di dalam partai politik. Sehingga melalui edukasi tersebut partai politik akan paham melalui tahapan dan proses yang akan dihadapi oleh PSI untuk menjadi peserta pemilu. Cara ini selalu dilakukan bekerja sama dengan berbagai peran kepemudaan terhadap politik. Anak muda yang ada di PSI memberikan edukasi politik kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi karena bisa merebut dukungan atau ketertarikan masyarakat untuk bergabung di partai politik.

Alasan edukasi yang dilakukan oleh anak muda bisa berdampak luas kepada masyarakat dan menjadi keuntungan PSI untuk bisa melihat dalam program kerja yang dijalankan terhadap program kerja yang secara tidak langsung menyentuh masyarakat. Hal ini juga menghadirkan cara berpolitik yang berbeda dengan memadukan gagasan anak muda yang ada di PSI dengan konten kreatif dan menjadikan keunggulan dalam kreatif yang bisa berpolitik penuh dan bisa mengedukasi bagi masyarakat luas dengan alasan lain untuk membangun kepercayaan publik. Setelah tingkat kepercayaan publik meningkat dan paham, maka dikenalilah tahapan atau proses untuk menjadi peserta pemilu yang dimulai dengan pasal 173 tentang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 agar tujuan untuk mengikuti pemilu tercapai

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan ialah mengenai Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pendaftaran dan Verifikasi partai politik Pemilu tahun 2019 dengan Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara. Terdapat beberapa kesimpulan yang akan penulis rangkum pada bab ini.

Partai Solidaritas Indonesia adalah salah satu partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2019. PSI juga dikenal dengan partai anak muda dan pastinya memiliki semangat tinggi dengan tahapan untuk menjadi peserta Pemilu. Maka itu PSI sangat kompetitif dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan pendaftaran hingga verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tahapan berlangsung keberadaan partai politik sangat dibutuhkan, dari tahapan inilah akan menjalankan fungsi dari partai politik dengan baik. Tahapan yang akan

dilalui bermula dari Pendaftaran partai politik kemudian mengikuti verifikasi administrasi dan yang terakhir memasuki verifikasi faktual.

Strategi yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara dalam menghadapi pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu dengan melakukan persiapan lebih melalui Kaderisasi yang menjadi sangat penting karena pada masa pendaftaran berlangsung sangat membutuhkan banyak anggota maka itu strategi lainnya dengan melihat secara administratif dengan melawan rezim administratif juga atau disebut dengan pesaing politik lainnya. Langkah lainnya adalah PSI selalu mendekati diri dengan rezim pemerintahan yang maknanya awal permulaan yang dilakukan setelah melakukan kaderisasi adalah harus mengenal rezim pemerintahan dari pernyataan tersebut melihat pada saat melakukan verifikasi di mana bentuk PSI yang awalnya selalu bergabung dengan event-event di istana pemerintahan dan pada masa itu di pemerintahan Joko Widodo. PSI juga sempat pernah rapat bersama Jokowi bahkan sempat diundang ke Istana Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2020). *Metode Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2010,
- Ferdiansyah, M. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media.
- Muhadam Labolo, D. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtie. A. (2012), *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*, (Malang, Jawa Timur :Setara Press.
- Permana, A. (2020). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia (E-BOOK)*. Jakarta Pusat: KPU.RI.
- Romli, L. (2021). *Partai Politik Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*. Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Perdana, A., DKK. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI
- Santoso, T. (2019). *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar grafika : jakarta tahun 2019
- Andyka, R. (2020). *strategis partai garuda pada proses verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usu*, Vol 1 Nomor 14, Hal. 14. Retrieved from <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11060>
- Dedi, A (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, halaman. 221.
- Febriansyah Kurniawan, D. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13 nomor 1, Hal. 4. Retrieved from <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7982/6828>
- Haryono. D. (2018). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*. Vol 6, No 2. Hal. 68.
- Madan,I, DKK. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Padang Panjang. *JISPO*. Vol. 9 No.1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/4144>
- Mubarok, Z. (2020). Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi*. Vol III, no 3 tahun 2020, Hal. 61
- Putra, A. (2020). Analisis Strategis Komunikasi Partai Politik Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Pare-pare). *Jurnal ABayan : Meida Kajian dan pengembangan Ilmu Dakwah*, 26 nomor 1, 45. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/5773/4661>
- Prayudi. (2017) Perbedaan Perlakuan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* Vol IX no. 07 tahun 2017. 21. Retrieved From http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-7-I

P3DI-April-2017-171.pdf

- Ramadhani, R. (2018) Partai Politik dan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol 16 No.3 Tahun 2018 halaman 249
- Riameinda, D. (n.d.). Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana (studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo, Sumatera Utara), Bunga Rampai Tata kelola Pemilu Indonesia., *Edisi 2 tahun 2020*, 231. Retrieved from <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/view/239>
- Rijali, A. (2018). Analisis data Kualitatif. *Jurnal ilmiah*, Vol. 13 Nomor 33. Hal. 94.
- Hidayatllah, R. (2020). Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi Tahun 2013. Jambi: Skripsi
- Nurhang. (2020). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. Skripsi. Halaman 21
- PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum
- PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan rekapitulasi politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD
- PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan rekapitulasi politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD
- Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/> pada tanggal 16 Desember 2022
- Badan Pusat Statistik. 2019, diakses dari <https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html> pada tanggal 17 Desember 2022
- Sulthoni. 2022. Ilmu Geografi Profil Provinsi Sumatera Utara: Sejarah, Geografi & Peta, diakses dari <https://tirto.id/profil-provinsi-sumatera-utara-sejarah-geografi-peta-gyTh> pada tanggal 16 Desember tahun 2022
- Partai Solidaritas Indonesia. 2015, <https://psi.id/trilogi-perjuangan-psi/> pada tanggal 20 desember 2022
- Nurpani, R. (2022), diakses dari <https://korankaltara.com/dinamika-verifikasi-partai-politik-peserta-pemilu-2024>
<https://kab-sukoharjo.kpu.go.id/berita/baca/8228/album-photo#:~:text=SIPOL%20adalah%20sistem%20dan%20teknologi,peserta%20Pemilu%20secara%20berkelanjutan%20di>
- Erdianto, K. *Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK*, diakses dari www.nasional.kompas.com pada 11 desember 2022
<https://www.gonews.co/berita/baca/2017/09/27/psi-optimis-akan-lolos-verifikasi-parpol-calon-peserta-pemilu-2019>